

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Ojol Gratis Lewat Jalan Berbayar

◆ Ditetapkan Angkutan Umum

JAKARTA (Poskota) - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akhirnya menggratiskan ojek online (ojol) ketika melintas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) jika nanti kebijakan tersebut jadi diterapkan.

Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo mengatajkan aturan gratis buat pengendara ojek online

sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) No 12 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa ojol termasuk angkutan umum.

"Sesuai PM (Peraturan Menteri Perhubungan) 12 tahun 2009, ojol oleh Pak Menhub menjadi angkutan umum. Angkutan sewa khusus sesuai PM 118 tahun 2018 angkutan sewa

khusus menjadi angkutan umum," kata Syafrin, dikutip, Minggu (12/2). "Oleh sebab itu, rencana penerapan kepada dua moda ini (ojek online dan taksi online) dikecualikan," sambungnya.

Sebelumnya, Syafrin Liputo berjanji, bahwa pihaknya akan menyerap semua aspirasi massa aksi yang tergabung dari pengemudi ojek online.

Pasalnya, massa aksi secara tegas menolak rencana kebijakan electronic road pricing (ERP) atau tarif jalan berbayar di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Februari 2023.

"Baik jadi kami dari dinas perhubungan tentu akan mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan ojol yang menyampaikan aspirasi di depan,

apa yang akan mereka sampaikan akan kami terima. Tentu itu semuanya dalam rangka perbaikan layanan transportasi di Jakarta," ujar Syafrin saat ditemui awak media, Rabu (8/2/2023).

Syafrin mengatakan, untuk saat ini kebijakan ERP sendiri masih dalam tahap rapat pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI

Jakarta dan belum ada pembahasan lanjutan.

"Belum (ada pembahasan), karena di dewan masih di tahap semacam rapat dengar pendapat, dan tentu dari dewan pun akan sangat objektif menerima masukan-masukan dari masyarakat, dari sisi kesewenangan mereka selaku pembuat kebijakan," katanya. **(Aldi/yh)**